



PERNYATAAN SIKAP BEM FH UPNVJ

Covid-19 Melanda, Indonesia Merana

Per (16/4), jumlah kasus positif Coronavirus Disease-2019 (Covid-19) di Indonesia berjumlah 5.516 kasus, 496 orang dinyatakan meninggal dunia, serta 548 orang sembuh dari virus ini¹. Menurut *World Health Organization* (WHO) virus ini menyebabkan penyakit mulai dari flu ringan hingga infeksi pernapasan yang lebih parah seperti MERS-CoV DAN SARS-CoV. Virus Corona bersifat zoonosis, artinya ia merupakan penyakit yang dapat ditularkan antara hewan dan manusia. Rabies, Malaria, merupakan contoh dari penyakit zoonosis yang ada. Begitu pula dengan MERS yang ditularkan dari unta ke manusia. Selama 70 tahun terakhir, para ilmuwan telah menemukan bahwa virus corona dapat menginfeksi tikus, anjing, kucing, kalkun, kuda, babi, dan ternak.

Terkadang, hewan-hewan ini dapat menularkan virus corona ke manusia. Virus corona bertanggung jawab atas beberapa wabah di seluruh dunia, termasuk pandemi Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) 2002-2003 dan wabah Middle East Respiratory Syndrome (MERS) di Korea Selatan pada tahun 2015. Oleh sebab itu, WHO per 11 Maret 2020, virus ini dinyatakan sebagai pandemi global.

Jika kita merunut kejadian kebelakang, pada Februari lalu, ahli epidemiologi Marc Lipsitch, dari Harvard TH Chan School of Public Health menduga bahwa sebenarnya virus corona telah menyebar di Indonesia, tetapi tak terdeteksi. Bukannya berhati-hati, Menteri Kesehatan, Terawan Agus Putranto malah meradang atas pernyataan tersebut. Terawan tidak terima dengan pernyataan bahwa Indonesia tak dapat mendeteksi virus corona. Menurut dia, Indonesia memiliki sejumlah peralatan canggih untuk mendeteksi virus corona.

"Itu namanya menghina, wong peralatan kita kemarin di-fix-kan dengan Duta Besar Amerika Serikat (AS). Kita menggunakan kit-nya (alat) dari AS," ujar Terawan, seperti yang dilansir dari Kompas.com (11/2).²

Selain Menkes, Menteri Perhubungan (Menhub) juga pernah menganggap sepele isu Covid-19. Menteri Perhubungan (Menhub) RI. Budi Karya Sumadi berkelakar bahwa tidak ditemukannya virus COVID-19 di Indonesia hingga saat ini karena masyarakatnya memiliki kekebalan tubuh lantaran setiap hari gemar makan nasi kucing.

¹ Covid19.go.id diakses pada 16 April 2020

² <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/11414911/pernyataan-peneliti-harvard-soal-virus-corona-dan-perlawanan-terawan>. Diakses pada 16 April 2020



"Tapi (ini) guyonan sama Pak Presiden ya, insya Allah ya, (virus) COVID-19 tidak masuk ke Indonesia karena setiap hari kita makan nasi kucing, jadi kebal," kata menhub, seperti yang dilansir antara.com³

Tak mau ketinggalan, Presiden Joko Widodo juga ikut meremehkan penyebaran Covid-19 pada masa awal penyebarannya. Jokowi bahkan memberikan insentif wisata kepada wisatawan untuk mendogkrak perekonomian akibat isu covid-19. Padahal pada tanggal 1 Maret, Jokowi mengumumkan adanya 2 Warga Negara Indonesia (WNI) yang terjangkit Covid-19.

"Tidak, insentif (wisata) itu kan kita berikan kepada wisatawan dari daerah-daerah yang sudah diperkirakan tidak menjadi episentrum dari virus corona," kata Jokowi, pada (2/3) seperti yang dilansir kompas.com⁴

Alhasi Indonesia menempati urutan pertama dengan jumlah kasus kematian tertinggi di Asia Tenggara dengan persentase 9.4 persen⁵. Padahal jika pemerintah serius untuk menekan angka penyebaran Covid-19, jumlah kasusnya tak akan melonjak hingga hari ini yang mencapai lima ribu orang lebih terjangkit Covid-19.

Kondisi ini berdampak pada sikap publik yang gagal menyiapkan diri untuk menghadapi apa yang terjadi. Sehingga muncul panic buying, stigma kepada pengidap corona yang melahirkan perisakan pada pasien corona, bahkan pasien lari dari rumah sakit dan menolak diobati bagi pasien PDP atau positif Covid 19.⁶

Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES) juga merilis hasil penelitian tentang komunikasi politik kabinet Jokowi dalam menghadapi pandemi Corona atau Covid-19. Hasilnya, LP3ES menemukan 13 pernyataan blunder pejabat negara di masa pra krisis, 4 pernyataan blunder di awal krisis dan 20 pernyataan blunder di masa krisis.

Belum lagi perihal meninggalnya tenaga medis yang berjuang di garda terdepan penyelesaian Covid-19. Sebanyak 31 tenaga medis yang menangani pasien Covid-19 meninggal dunia⁷. Mereka gugur saat menjalankan sumpah profesinya, menyelamatkan nyawa manusia tanpa pandang bulu.

Mereka bertaruh nyawa demi kesembuhan manusia lain, sementara itu alat pelindung diri (APD) yang digunakan tak layak dan tak memadai jumlahnya di saat pandemi Covid-19 seperti sekarang.

³ <https://www.antaranews.com/berita/1302390/budi-karya-virus-covid-19-tidak-masuk-indonesia-karena-nasi-kucing>. Diakses pada 16 April 2020

⁴ <https://nasional.kompas.com/read/2020/02/12/11414911/pernyataan-peneliti-harvard-soal-virus-corona-dan-perlawanan-terawan>. Diakses pada 16 Maret 2020

⁵ <https://www.thejakartapost.com/news/2020/04/14/covid-19-indonesia-records-60-deaths-in-single-day.html> . Diakses pada 16 Maret 2020

⁶ <https://www.liputan6.com/news/read/4221200/lp3es-ada-37-statemen-blunder-pemerintah-terkait-covid-19> Diakses pada 16 Maret 2020

⁷ <https://www.okezone.com/tren/read/2020/04/12/620/2197924/inilah-penyebab-banyak-tenaga-medis-di-indonesia-meninggal-terkena-corona-covid-19> Diakses pada 16 April 2020



Keterbatasan APD ini menjadi ancaman serius para garda terdepan ini. Mereka yang bertemu langsung dengan pasien COVID-19 dihadapkan pada realita miris yang harus mereka terima. Lagi-lagi, semua demi menjalankan sumpah profesi yang tak boleh mereka abaikan. APD sangat dibutuhkan karena atribut itu berfungsi sebagai penghalang bahan infeksius seperti virus dan bakteri yang bisa saja menempel di kulit, mulut, hidung, atau selaput lendir mata para tenaga kesehatan. Dalam hal ini negara tak boleh abai, mereka harus memperhatikan kelengkapan APD tenaga medis agar tak menimbulkan lebih banyak korban lagi dikemudian hari.

Apalagi Pusat Pemodelan Matematika dan Simulasi Institut Teknologi Bandung memperkirakan puncak wabah Covid-19 di Indonesia akan terjadi pada April hingga Mei. Itu pun dengan syarat terus diupayakan penanganan yang komprehensif, khususnya untuk mencegah penyebaran yang lebih luas agar jumlah korban terinfeksi dapat ditekan.

Berkaca pada kasus Italia dengan korban meninggal terbanyak di dunia, langkah-langkah antisipasi, termasuk ketegasan dalam memastikan penyebaran virus corona tidak bertambah, harus konsisten dilaksanakan.⁸

Belum lagi permasalahan perlindungan hukum tenaga kerja serta keseimbangan antara hak-hak pekerja dan kewajiban kerja mereka. Pandemi ini menyerang khususnya sektor-sektor ekonomi. Dunia usaha mengalami kerugian yang tidak sedikit karena banyak usaha harus menghentikan produksi. Yang jelas, kesehatan pekerja tetap harus diutamakan sebagai kewajiban pelaku usaha yang telah diatur dalam undang-undang.

Pemerintah harus memastikan semua pelaku usaha, khususnya di daerah-daerah paling terancam, memberikan kebijakan internalnya yang lebih mendahulukan kesehatan pekerja daripada perhitungan untung-rugi usaha. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan, pemerintah adalah pihak yang menjadi penengah antara pekerja dan pelaku usaha agar pemenuhan hak dan kewajiban di antara para pihak dapat seimbang.

Dalam situasi sulit seperti ini, pemerintah harus memastikan pelaku usaha tidak mengabaikan kewajiban mereka untuk memberikan upah yang menjadi hak pekerja, termasuk pekerja dengan upah harian. Namun, bagi usaha yang tetap mengharuskan pekerja masuk, diperlukan kebijakan mengenai waktu kerja, kesehatan lingkungan kerja, dan pola interaksi antar-pekerja untuk menghindari penularan Covid-19.

Persolan diatas merupakan Sebagian kecil dari ketidaksiapannya negara dalam menghadapi pandemic covid-19. Padahal pemerintah mempunyai waktu cukup untuk menghadapi Covid-19, jika diawal tak meremehkan virus ini serta tak melulu mementingkan kehidupan ekonomi semata.

⁸ <https://kolom.tempo.co/read/1323201/masalah-hukum-dalam-wabah-covid-19/full&view=ok> Diakses pada 16 April 2020



Atas hal ini, Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta (BEM FH UPNVJ) menyatakan sikap:

1. Mendesak pemerintah untuk serius dalam penanganan pandemi Covid-19 yang berorientasi kepada keselamatan rakyat
2. Mendesak pemerintah untuk bersikap tegas dengan tetap menjamin hak-hak warga negara sesuai konstitusi untuk upaya memutus mata rantai penyebaran covid-19
3. Mendesak pemerintah untuk senantiasa memberikan perlindungan kepada tenaga medis dengan memenuhi Alat Pelindung Diri (APD)
4. Menuntut pemerintah untuk memberikan perlindungan hukum dan kepastian terkait upah kepada tenaga kerja yang terdampak Covid-19
5. Menolak dengan tegas tindakan represifitas aparat kepolisian dalam penanganan keamanan pada masa pandemi Covid-19
6. Menolak pemberlakuan darurat sipil dalam penanganan Covid-19 yang dianggap menunjukkan otoritarian negara
7. Mengecam berbagai pernyataan pejabat publik yang terkesan meremehkan penyebaran Covid-19 dan berdampak kepada ketidakstabilan di masyarakat

Narahubung

M. Faisal Reza (081385047610)